

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PENGUJI	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang	1
2. Rumusan Masalah	9
3. Tujuan Penelitian	9
4. Manfaat Penelitian	9
5. Tinjauan Pustaka	10
5.1 Konsep Perjanjian Pendahuluan	10
5.2 Konsep Perikatan Bersyarat	11
5.3 Konsep Tanggung Gugat	14
6. Metode Penelitian	15
6.1 Tipe Penelitian Hukum	15
6.2 Pendekatan Penelitian	16

6.3 Sumber Bahan Hukum	17
6.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	18
6.5 Analisis Bahan Hukum	19
6.6 Sistematika Penulisan	19
BAB II KARAKTERISTIK PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI RUMAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11/PRT/M/2019 TENTANG SISTEM PERJANJIAN PENDAHULUAN JUAL BELI RUMAH	21
1. Konsep Pemasaran Properti Dengan Sistem <i>Pre Project Selling</i>	21
2. Konsep Perjanjian Pendahuluan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli	30
2.1 Karakteristik Perjanjian Pendahuluan	30
2.2 Karakteristik Perjanjian Pengikatan Jual Beli	36
3. Peralihan Hak Kepemilikan Atas Dasar Perjanjian Pengikatan Jual Beli	56
BAB III TANGGUNG GUGAT ATAS PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH	66
1. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	66
2. Tanggung Gugat Keperdataan	73
2.1 Dasar Gugatan atas Perjanjian Pendahuluan	74
2.2 Dasar Gugatan atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli	78
BAB IV PENUTUP	
1. Kesimpulan	95
2. Saran	97
DAFTAR BACAAN	

DAFTAR PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Burgerlijk Wetboek. Het Staatsblad van Nederlandsch Indie 1847 Nomor 23
Tentang *Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie*.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7.
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 3. Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5491.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3821.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5252.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696.

Peraturan Menteri Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/2/2017 Tentang
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 291.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
Nomor 11/PRT/M/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli
Rumah. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 777.

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 11/KPTS/1994 Tentang
Pedoman Perikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun.

Keputusan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 09/KPTS/M/1995 tanggal
26 Juni 1995 Tentang Pedoman Pengikatan Jual Beli Rumah.

DAFTAR TABEL

Tabel I.	Perbedaan Perjanjian Pendahuluan, PPJB dan AJB	42
Tabel II.	Perbedaan Kepmen PPJB Rumah, Kepmen PPJB Sarusun dan Permen PUPR	47